



Media: BERNAS

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Maret 2017

Halaman: 1

## Penyandang Disabilitas Desak Sahkan Raperda

**JOGJA, BERNAS**--Puluhan penyandang disabilitas yang menamakan dirinya Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas mendatangi DPRD Kota Yogyakarta, Selasa (7/3). Mereka menuntut agar Perda Perlindungan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas segera disahkan.

Koordinator Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas, Arni Surwanti, mengatakan maksud kedatangannya ke DPRD Kota Yogyakarta untuk menayakan perkembangan Perda Perlindungan Disabilitas. "Inisiasi Perda sejak akhir 2014, pembahasan juga sudah mulai 2015. Kami berharap agar Raperda itu segera disahkan," katanya.

Arni menerangkan, Forum Penguatan Penyandang Disabilitas sudah datang ke DPRD Kota pada November 2016. Menurut Arni, saat itu ada kendala pada draft akademik.

"Kami dari forum, sudah menyampaikan usulan dan masukan tentang Raperda Penyandang Disabilitas. Pada awal November kami mendengar ada penundaan

pengesahan Perda Disabilitas karena diperlukan adanya penyesuaian naskah akademik dan draft perda dengan UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas," ujar Arni.

Menurutnya, Kota Yogyakarta merupakan satu-satunya daerah di DIY yang belum menetapkan dan mengesahkan Perda Disabilitas. Oleh karena itu, pihaknya mendesak DPRD Kota Yogyakarta menggelar sidang paripurna pengesahan Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta.

Arni menegaskan, Raperda tersebut memberi arti yang sangat penting bagi komunitas penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, karena perda ini diharapkan dapat mengemban misi untuk memperkuat hak dan menghapus berbagai bentuk diskriminasi yang dihadapi penyandang disabilitas dalam kehidupannya.

"Perda ini juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya Kota Yogyakarta menjadi kota yang ramah penyandang disabilitas. Kota yang ramah

disabilitas adalah kota yang mampu memberikan fasilitas dan layanan yang diperlukan oleh semua ragam penyandang disabilitas," kata Arni.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Disabilitas DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Ali Fahmi, mengatakan saat ini perda tersebut sedang dibahas oleh pansus. "Semoga Perda Disabilitas segera terealisasi. Kami berupaya menyelesaikan keinginan tersebut," katanya.

Ali Fahmi menerangkan, penyebab pembahasan molor di antaranya adanya masukan-masukan dari masyarakat dan penyesuaian naskah akademik perda dengan UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

"Dulu hanya 44 pasal pada 11 April 2016, namun rekan-rekan penyandang disabilitas memberi masukan berjumlah 86 pasal. Ini menurut saya luar biasa. Saya yakin akan lebih sempurna," ujar Fahmi.

Fahmi berharap proses raperda ke perda terus dikawal. Pihaknya juga berterimakasih terhadap masukan para penyandang disabilitas yang berusaha membantu menyempurnakan hasil draft raperda yang dibuat oleh pihaknya. "Kami mencoba bahas raperda secara maraton dan berhati-hati. Kami harap jangan sampai ada yang terlewatkan," ujarnya.

Menurutnya, proses pengesahan raperda membutuhkan waktu yang tidak cepat, karena harus melewati proses-proses sesuai aturan yang ada. Dia menjelaskan, saat ini tinggal lima pasal yang belum dibahas. "Setelah finalisasi, ada sidang paripurna, kemudian di bawa ke provinsi untuk difasilitasi atau ditinjau kembali, kemudian habis itu disahkan. Sehabis disahkan, kemudian hasilnya didaftarkan nomor register," jelasnya.

(m3)

| Instansi        | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Sosial | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 07 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005